KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 99.K/MG.05/DJM/2023
TENTANG
PENAHAPAN WILAYAH DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ISI ULANG *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU TEPAT SASARAN

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu yang tepat sasaran, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi perlu mengatur lebih lanjut mengenai penahapan wilayah dan waktu pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu tepat sasaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi stentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,

4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefed Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefed Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENAHAPAN WILAYAH DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ISI ULANG *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU TEPAT SASARAN.

KESATU : Menetapkan penahapan wilayah dan waktu pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu tepat sasaran sebagai berikut:

a. Tahap I
   1. Pelaksanaan proses pendataan pengguna LPG Tertentu oleh Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu ke dalam sistem berbasis *web* dan/atau aplikasi yang dibuat Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023; dan
   2. Pelaksanaan pembelian LPG Tertentu hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis *web* dan/atau aplikasi,

Pendataan pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan secara bertahap pada wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

b. Tahap II

1. Pemadanan data pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis *web* dan/atau aplikasi yang dibuat Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu dengan data *by name by address* dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian/lembaga terkait; dan
2. Pensasaran pengguna LPG Tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) hanya pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dan tercantum dalam data *by name by address* dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian/lembaga terkait yang dapat membeli LPG Tertentu; dan
   b) pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dan tercantum dalam data *by name by address* sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 dapat membeli LPG Tertentu dengan pembatasan volume pembelian LPG Tertentu per bulan per pengguna LPG Tertentu.

   Pendistribusian isi ulang LPG Tertentu untuk tahap II dilaksanakan setelah Peraturan Presiden yang mengatur mengenai pensasaran pengguna LPG Tertentu mulai berlaku.

KEDUA : Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan penahapan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu tepat sasaran kepada Direktur Jenderal setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : a. Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu dapat mengajukan usulan perubahan waktu dan wilayah pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu tepat sasaran; dan

b. Berdasarkan hasil evaluasi, Direktur Jenderal dapat menetapkan perubahan waktu dan wilayah pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu tepat sasaran.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

TUTUKA ARIADJI

Tembusan:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
5. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
6. Direktur Utama Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 99.K/MG.05/DJM/2023
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENAHAPAN WILAYAH DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ISI ULANG *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU TEPAT SASARAN

TAHAPAN WILAYAH DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDATAAN PENGGUNA LPG TERTENTU

A. TAHAPAN PELAKSANAAN PENDATAAN PENGGUNA LPG TERTENTU

1. Pendataan pengguna LPG Tertentu untuk wilayah kabupaten/kota pada provinsi di Pulau Jawa, Pulau Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 1 Maret 2023;
2. Pendataan pengguna LPG Tertentu untuk wilayah kabupaten/kota pada provinsi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 1 Mei 2023;
3. Evaluasi pelaksanaan pendataan pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
4. Sejak tanggal 1 Januari 2024 dimulai pemberlakuan bahwa hanya pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis *web* dan/atau aplikasi yang dapat membeli LPG Tertentu.

B. RINCIAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDATAAN PENGGUNA LPG TERTENTU

No.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
I. WILAYAH PELAKSANAAN MULAI TANGGAL 1 MARET 2023			
1	BANTEN	1	KOTA TANGERANG
		2	KOTA CILEGON
2	JAWA BARAT	3	KOTA BANJAR
		4	KOTA CIREBON
		5	KOTA BOGOR
		6	KOTA SUKABUMI
		7	KAB. PURWAKARTA
3	JAWA TENGAH	8	KOTA SEMARANG
		9	KOTA MAGELANG
		10	KOTA TEGAL
		11	KOTA SALATIGA
4	JAWA TIMUR	12	KOTA MOJOKERTO
		13	KOTA BLITAR
		14	KOTA PASURUAN
5	BALI	15	KAB. KLUNGKUNG
II. WILAYAH PELAKSANAAN MULAI TANGGAL 1 APRIL 2023			
1	BANTEN	1	KOTA SERANG
		2	KAB. LEBAK
2	JAWA BARAT	3	KOTA DEPOK
		4	KAB. CIANJUR
		5	KAB. SUMEDANG
		6	KOTA CIMAHI
		7	KOTA TASIKMALAYA
		8	KAB. KUNINGAN
		9	KAB. MAJALENGKA
		10	KAB. SUBANG
		11	KAB. KARAWANG
3	JAWA TENGAH	12	KOTA PEKALONGAN
		13	KAB. PURWOREJO
		14	KAB. REMBANG
		15	KAB. BATANG
		16	KAB. WONOSOBO
		17	KAB. BLORA
		18	KAB. WONOGIRI
		19	KOTA SURAKARTA
4	JAWA TIMUR	20	KOTA MADIUN
		21	KOTA PROBOLINGGO
		22	KOTA BATU
		23	KAB. PACITAN
		24	KOTA KEDIRI
		25	KAB. MAGETAN

No.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
		26	KAB. BOJONEGORO
		27	KAB. SAMPANG
5	BALI	28	KAB. JEMBRANA
		29	KAB. BANGLI
6	NUSA TENGGARA BARAT	30	KAB. SUMBAWA BARAT
		31	KOTA BIMA
		32	KAB. LOMBOK UTARA
III. WILAYAH PELAKSANAAN MULAI TANGGAL 1 MEI 2023			
1	BANTEN	1	KAB. PANDEGLANG
		2	KAB. SERANG
2	DKI JAKARTA	3	KOTA JAKARTA PUSAT
		4	KOTA JAKARTA UTARA
3	JAWA BARAT	5	KAB. PANGANDARAN
		6	KAB. CIAMIS
		7	KAB. BANDUNG BARAT
		8	KAB. SUKABUMI
		9	KAB. CIREBON
		10	KAB. INDRAMAYU
		11	KOTA BEKASI
4	JAWA TENGAH	12	KAB. TEMANGGUNG
		13	KAB. KENDAL
		14	KAB. PEKALONGAN
		15	KAB. PURBALINGGA
		16	KAB. BANJARNEGARA
		17	KAB. SUKOHARJO
5	DI YOGYAKARTA	18	KAB. GUNUNG KIDUL
6	JAWA TIMUR	19	KAB. BONDOWOSO
		20	KAB. SITUBONDO
		21	KAB. PROBOLINGGO
		22	KAB. NGAWI
		23	KAB. PONOROGO
		24	KAB. MADIUN
		25	KAB. PAMEKASAN
		26	KAB. TRENGGALEK
		27	KAB. BANGKALAN
7	BALI	28	KAB. KARANGASEM
		29	KAB. GIANYAR
8	NUSA TENGGARA BARAT	30	KAB. DOMPU
		31	KAB. BIMA
9	ACEH	32	KOTA SABANG
		33	KAB. ACEH SINGKIL
		34	KAB. ACEH JAYA
		35	KOTA SUBULUSSALAM
		36	KAB. GAYO LUWES
		37	KAB. NAGAN RAYA

No.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
10	SUMATERA UTARA	39	KAB. PAKPAK BARAT
		40	KAB. NIAS BARAT
		41	KAB. NIAS UTARA
		42	KAB. NIAS
		43	KAB. NIAS SELATAN
		44	KOTA SIBOLGA
11	SUMATERA BARAT	45	KOTA SOLOK
		46	KOTA PADANG PANJANG
		47	KOTA PARIAMAN
		48	KOTA SAWAH LUNTO
		49	KOTA BUKIT TINGGI
		50	KAB. SOLOK SELATAN
12	JAMBI	51	KOTA SUNGAI PENUH
13	BENGKULU	52	KAB. KAUR
14	BANGKA BELITUNG	53	KAB. BELITUNG TIMUR
15	SUMATERA SELATAN	54	KAB. MUSI RAWAS UTARA
16	KALIMANTAN UTARA	55	KAB. TANAH TIDUNG
		56	KAB. MALINAU
		57	KAB. NUNUKAN
17	KALIMANTAN TIMUR	58	KAB. MAHAKAM ULU
18	KALIMANTAN TENGAH	59	KAB. SUKAMARA
		60	KAB. MURUNG RAYA
		61	KAB. LAMANDAU
		62	KAB. SERUYAN
		63	KAB. GUNUNG MAS
		64	KAB. BARITO SELATAN
		65	KAB. BARITO UTARA
		66	KAB. KATINGAN
19	KALIMANTAN BARAT	67	KAB. KAYONG UTARA
20	SULAWESI TENGGARA	68	KAB. KONAWE KEPULAUAN
		69	KAB. KONAWE UTARA
21	SULAWESI TENGAH	70	KAB. MOROWALI
		71	KAB. BUOL
		72	KAB. TOJO UNA-UNA
		73	KAB. MOROWALI UTARA
22	SULAWESI UTARA	74	KAB. BOLMONG TIMUR
		75	KAB. BOLMONG UTARA
		76	KAB. BOLMONG SELATAN
23	SULAWESI BARAT	77	KAB. MAMASA
IV. WILAYAH PELAKSANAAN MULAI TANGGAL 1 JUNI 2023			
1	BANTEN	1	KOTA TANGERANG SELATAN
2	DKI JAKARTA	2	KOTA JAKARTA BARAT
		3	KAB. KEPULAUAN SERIBU
3	JAWA BARAT	4	KAB. TASIKMALAYA
		5	KAB. BEKASI

No.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
		7	KOTA BANDUNG
4	JAWA TENGAH	8	KAB. KEBUMEN
		9	KAB. CILACAP
		10	KAB. TEGAL
		11	KAB. SRAGEN
		12	KAB. BOYOLALI
		13	KAB. KUDUS
		14	KAB. JEPARA
		15	KAB. MAGELANG
		16	KAB. KARANGANYAR
5	DI YOGYAKARTA	17	KAB. KULON PROGO
		18	KOTA YOGYAKARTA
6	JAWA TIMUR	19	KAB. LAMONGAN
		20	KAB. JOMBANG
		21	KAB. SUMENEP
		22	KAB. BLITAR
		23	KAB. LUMAJANG
		24	KOTA MALANG
		25	KAB. NGANJUK
		26	KAB. TUBAN
		27	KAB. MOJOKERTO
		28	KAB. GRESIK
		29	KAB. SIDOARJO
		30	KAB. MALANG
7	BALI	31	KAB. TABANAN
		32	KAB. BADUNG
8	NUSA TENGGARA BARAT	33	KAB. LOMBOK BARAT
		34	KAB. SUMBAWA
9	ACEH	35	KAB. ACEH SELATAN
		36	KOTA LANGSA
		37	KAB. PIDIE JAYA
		38	KAB. ACEH TENGAH
		39	KOTA LHOKSEUMAWE
		40	KAB. ACEH TENGGARA
10	SUMATERA UTARA	41	KAB. SAMOSIR
		42	KOTA TANJUNG BALAI
		43	KOTA PADANG SIDEMPUAN
		44	KOTA GUNUNG SITOLI
11	RIAU	45	KAB. MERANTI
12	SUMATERA BARAT	46	KAB. PASAMAN
		47	KAB. SIJUNJUNG
13	JAMBI	48	KAB. KERINCI
		49	KAB. SAROLANGUN
14	BENGKULU	50	KAB. LEBONG
		51	KAB. BENGKULU TENGAH
		52	KAB. KEPAHYANG

No.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
		53	KAB. BENGKULU SELATAN
		54	KAB. MUKO-MUKO
15	BANGKA BELITUNG	55	KAB. BELITUNG
16	SUMATERA SELATAN	56	KOTA PRABUMULIH
		57	KOTA PAGAR ALAM
		58	KAB. EMPAT LAWANG
17	LAMPUNG	59	KAB. PESISIR BARAT
18	KALIMANTAN UTARA	60	KOTA TARAKAN
		61	KAB. BULUNGAN
19	KALIMANTAN TIMUR	62	KOTA BONTANG
20	KALIMANTAN TENGAH	63	KAB. BARITO TIMUR
		64	KAB. PULANG PISAU
21	KALIMANTAN BARAT	65	KAB. SEKADAU
22	KALIMANTAN SELATAN	66	KAB. BALANGAN
		67	KAB. TAPIN
23	SULAWESI TENGGARA	68	KAB. KOLAKA UTARA
		69	KAB. KOLAKA TIMUR
24	SULAWESI TENGAH	70	KAB. TOLI-TOLI
		71	KAB. POSO
		72	KAB. SIGI
25	GORONTALO	73	KAB. GORONTALO UTARA
		74	KAB. BOALEMO
		75	KAB. POHUWATO
26	SULAWESI BARAT	76	KAB. MAMUJU TENGAH
		77	KAB. MAJENE
		78	KAB. MAMUJU UTARA
27	SULAWESI SELATAN	79	KAB. SELAYAR
		80	KAB. TORAJA UTARA
V. WILAYAH PELAKSANAAN MULAI TANGGAL 1 JULI 2023			
1	BANTEN	1	KAB. TANGERANG
2	DKI JAKARTA	2	KOTA JAKARTA SELATAN
		3	KOTA JAKARTA TIMUR
3	JAWA BARAT	4	KAB. BANDUNG
		5	KAB. BOGOR
4	JAWA TENGAH	6	KAB. DEMAK
		7	KAB. GROBOGAN
		8	KAB. SEMARANG
		9	KAB. PEMALANG
		10	KAB. PATI
		11	KAB. KLATEN
		12	KAB. BANYUMAS
		13	KAB. BREBES
5	DI YOGYAKARTA	14	KAB. BANTUL
		15	KAB. SLEMAN
6	JAWA TIMUR	16	KAB. BANYUWANGI

No.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
		18	KAB. PASURUAN
		19	KAB. JEMBER
		20	KOTA SURABAYA
		21	KAB. TULUNGAGUNG
7	BALI	22	KAB. BULELENG
		23	KOTA DENPASAR
8	NUSA TENGGARA BARAT	24	KAB. LOMBOK TENGAH
		25	KAB. LOMBOK TIMUR
9	ACEH	26	KAB. BENER MERIAH
		27	KAB. ACEH BARAT
		28	KOTA BANDA ACEH
10	SUMATERA UTARA	29	KAB. HUMBANG HASUDUTAN
		30	KOTA TEBING TINGGI
		31	KAB. PADANG LAWAS UTARA
		32	KAB. PADANG LAWAS
		33	KAB. TOBA
11	KEPULAUAN RIAU	34	KAB. KARIMUN
		35	KAB. BINTAN
12	SUMATERA BARAT	36	KOTA PAYAKUMBUH
13	JAMBI	37	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
		38	KAB. TEBO
14	BENGKULU	39	KAB. SELUMA
		40	KAB. REJANG LEBONG
15	BANGKA BELITUNG	41	KAB. BANGKA SELATAN
		42	KAB. BANGKA BARAT
		43	KAB. BANGKA TENGAH
16	SUMATERA SELATAN	44	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
17	LAMPUNG	45	KAB. MESUJI
		46	KOTA METRO
		47	KAB. TULANG BAWANG BARAT
		48	KAB. LAMPUNG BARAT
18	KALIMANTAN BARAT	49	KAB. MELAWI
		50	KAB. KAPUAS HULU
19	KALIMANTAN SELATAN	51	KAB. TABALONG
		52	KAB. HULU SUNGAI UTARA
		53	KAB. KOTABARU
		54	KAB. HULU SUNGAI SELATAN
		55	KAB. HULU SUNGAI TENGAH
20	KALIMANTAN TENGAH	56	KAB. KOTAWARINGIN BARAT
21	KALIMANTAN TIMUR	57	KAB. PENAJAM
		58	KAB. PASER
		59	KAB. BERAU
22	SULAWESI TENGAH	60	KAB. DONGGALA
23	SULAWESI SELATAN	61	KAB. TANA TORAJA
		62	KOTA PARE PARE

No.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
		63	KAB. BANTAENG
		64	KAB. ENREKANG
		65	KAB. BARRU
24	SULAWESI TENGGARA	66	KAB. BOMBANA
25	GORONTALO	67	KAB. BONE BOLANGO
26	SULAWESI UTARA	68	KAB. MINAHASA TENGGARA
		69	KOTA TOMOHON
		70	KOTA KOTAMOBAGU
		71	KAB. BOLMONG
VI. WILAYAH PELAKSANAAN MULAI TANGGAL 1 AGUSTUS 2023			
1	ACEH	1	KAB. ACEH TAMIANG
		2	KAB. ACEH TIMUR
2	SUMATERA UTARA	3	KAB. DAIRI
		4	KAB. TAPANULI TENGAH
		5	KAB. TAPANULI SELATAN
		6	KAB. TAPANULI UTARA
		7	KAB. LABUHAN BATU SELATAN
		8	KAB. MANDAILING NATAL
3	RIAU	9	KOTA DUMAI
4	KEPULAUAN RIAU	10	KOTA TANJUNG PINANG
5	SUMATERA BARAT	11	KAB. DHARMASRAYA
		12	KAB. SOLOK
		13	KAB. LIMA PULUH KOTO
		14	KAB. TANAH DATAR
		15	KAB. PASAMAN BARAT
6	JAMBI	16	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
		17	KAB. BUNGO
		18	KAB. MERANGIN
		19	KAB. MUARA JAMBI
7	BENGKULU	20	KAB. BENGKULU UTARA
8	BANGKA BELITUNG	21	KOTA PANGKAL PINANG
9	SUMATERA SELATAN	22	KOTA LUBUK LINGGAU
		23	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN
		24	KAB. MUSI RAWAS
10	LAMPUNG	25	KAB. WAY KANAN
11	KALIMANTAN BARAT	26	KAB. LANDAK
		27	KAB. BENGKAYANG
12	KALIMANTAN SELATAN	28	KAB. TANAH BUMBU
		29	KOTA BANJAR BARU
		30	KAB. BARITO KUALA
13	KALIMANTAN TENGAH	31	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
		32	KAB. KAPUAS
14	KALIMANTAN TIMUR	33	KAB. KUTAI BARAT
15	SULAWESI TENGAH	34	KAB. BANGGAI DARATAN

No.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
16	SULAWESI SELATAN	36	KAB. SINJAI
		37	KAB. LUWU UTARA
		38	KOTA PALOPO
		39	KAB. JENEPONTO
		40	KAB. SOPPENG
17	SULAWESI TENGGARA	41	KAB. KOLAKA
18	SULAWESI BARAT	42	KAB. MAMUJU
19	GORONTALO	43	KOTA GORONTALO
20	SULAWESI UTARA	44	KOTA BITUNG
VII. WILAYAH PELAKSANAAN MULAI TANGGAL 1 SEPTEMBER 2023			
1	ACEH	1	KAB. ACEH BESAR
		2	KAB. BIREUEN
		3	KAB. PIDIE
		4	KAB. ACEH UTARA
2	SUMATERA UTARA	5	KOTA BINJAI
		6	KOTA PEMATANG SIANTAR
		7	KAB. LABUHAN BATU UTARA
3	RIAU	8	KAB. KUANTAN SINGINGI
		9	KAB. PELALAWAN
		10	KAB. INDRAGIRI HULU
4	SUMATERA BARAT	11	KAB. PADANG PARIAMAN
		12	KAB. PESISIR SELATAN
		13	KAB. AGAM
5	JAMBI	14	KAB. BATANGHARI
6	BENGKULU	15	KOTA BENGKULU
7	BANGKA BELITUNG	16	KAB. BANGKA
8	SUMATERA SELATAN	17	KAB. OGAN ILIR
		18	KAB. LAHAT
		19	KAB. OGAN KOMERING ULU
9	LAMPUNG	20	KAB. TULANG BAWANG
		21	KAB. LAMPUNG UTARA
		22	KAB. TANGGAMUS
		23	KAB. PRINGSEWU
		24	KAB. PESAWARAN
10	KALIMANTAN BARAT	25	KOTA SINGKAWANG
		26	KAB. MEMPAWAH
		27	KAB. SINTANG
		28	KAB. KETAPANG
		29	KAB. SANGGAU
11	KALIMANTAN SELATAN	30	KAB. TANAH LAUT
12	KALIMANTAN TENGAH	31	KOTA PALANGKARAYA
13	KALIMANTAN TIMUR	32	KAB. KUTAI TIMUR
14	SULAWESI SELATAN	33	KAB. LUWU TIMUR
		34	KAB. TAKALAR
		35	KAB. PANGKEP

No.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
		37	KAB. SIDENRENG RAPPANG
		38	KAB. BULUKUMBA
		39	KAB. WAJO
15	SULAWESI TENGGARA	40	KAB. KONAWE
		41	KAB. LUWU
		42	KAB. KONAWE SELATAN
		43	KOTA KENDARI
16	SULAWESI BARAT	44	KAB. POLEWALI MANDAR
17	GORONTALO	45	KAB. GORONTALO
18	SULAWESI UTARA	46	KAB. MINAHASA
VIII. WILAYAH PELAKSANAAN MULAI TANGGAL 1 OKTOBER 2023			
1	SUMATERA UTARA	1	KAB. BATUBARA
		2	KAB. KARO
		3	KAB. SERDANG BEDAGAI
		4	KAB. ASAHAN
		5	KAB. LABUHAN BATU
		6	KAB. SIMALUNGUN
		7	KAB. LANGKAT
		8	KAB. DELI SERDANG
		9	KOTA MEDAN
2	RIAU	10	KAB. ROKAN HULU
		11	KAB. SIAK
		12	KAB. BENGKALIS
		13	KAB. ROKAN HILIR
		14	KAB. INDRAGIRI HILIR
		15	KAB. KAMPAR
		16	KOTA PEKANBARU
3	KEPULAUAN RIAU	17	KOTA BATAM
4	SUMATERA BARAT	18	KOTA PADANG
5	JAMBI	19	KOTA JAMBI
6	SUMATERA SELATAN	20	KAB. MUARA ENIM
		21	KAB. MUSI BANYUASIN
		22	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR
		23	KAB. OGAN KOMERING ILIR
		24	KAB. BANYUASIN
		25	KOTA PALEMBANG
7	LAMPUNG	26	KAB. LAMPUNG TIMUR
		27	KAB. LAMPUNG SELATAN
		28	KAB. LAMPUNG TENGAH
		29	KOTA BANDAR LAMPUNG
8	KALIMANTAN BARAT	30	KAB. SAMBAS
		31	KAB. KUBU RAYA
		32	KOTA PONTIANAK
9	KALIMANTAN SELATAN	33	KAB. BANJAR
		34	KOTA BANJARMASIN

No.	PROVINSI		KABUPATEN/KOTA
10	KALIMANTAN TIMUR	35	KOTA BALIKPAPAN
		36	KAB. KUTAI KERTANEGARA
		37	KOTA SAMARINDA
11	SULAWESI SELATAN	38	KAB. MAROS
		39	KAB. BONE
		40	KAB. GOWA
		41	KOTA MAKASSAR
12	SULAWESI TENGAH	42	KOTA PALU
13	SULAWESI UTARA	43	KOTA MANADO

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

TUTUKA ARIADJI